

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025-2029**

RENSTRA TAHUN 2025-2029



TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029 merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) tahun, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENCANA STRATEGIS periode 2021-2024 dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2024 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda pembangunan serta visi dan misi Sulawesi Tengah, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, maka Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah lebih konkrit.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kita semua!

Palu, 23 September 2025

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730321 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Maksud Dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Gambaran Umum	14
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1 Tujuan Dan Sasaran	46
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	48
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB V PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Golongan	22
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	23
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Jenis Kelamin	23
Tabel 2.4	Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana	24
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga	25
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2024	33
Tabel 2.7	Isu Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga	39
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga	47
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga	48
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga	50
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga	54
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pemuda Dan Olahraga	81
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	94
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Dan Olahraga	95
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemuda Dan Olahraga	95
Tabel 4.6	Formulasi Dan Definisi Operasional IKU Dan IKK	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah	21
Gambar 2.2	Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2024	34
Gambar 3.1	Bagan Cascading RPJMD 2025-2029	45
Gambar 3.2	Bagan Cascading RENSTRA PD 2025-2029	45
Gambar 4.2	Skala Penentuan IPO	99
Gambar	Bagan Crosscutting RAD Pelayanan Kepemudaan	101
Gambar	Bagan Crosscutting Desain Olahraga Daerah	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi PD dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan penetapan Renstra PD. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun terkait dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan penjabaran dari visi misi Gubernur terpilih Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan PD akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renja PD.

Visi pada rencana pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yakni
“BERANI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH SEBAGAI WILAYAH

PERTANIAN DAN INDUSTRI YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN 2025-2029”.

Dalam menjabarkan Visi serta keempat misi, dimana misi yang sangat erat kaitannya dengan bidang tugas Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Misi : **1). Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penyediaan Lapangan Kerja.** Sedangkan **tujuan** yang menjadi urusan penunjang diwujudkan pada tahun 2025-2029 adalah :

Mewujudkan Kualitas Masyarakat Sulawesi Tengah Yang Berdaya Saing, untuk **indikator tujuan** yang mengarah pada **Indeks Modal Manusia (IMM)**, dan **sasaran strategis** yaitu **Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat**, serta **indikator sasaran strategis** yakni peningkatan **Usia Harapan Hidup**.

meningkatkan Peran pemuda dalam pertumbuhan ekonomi melalui wirausaha muda, keterlibatan pemuda pada organisasi sosial, keikutsertaan dan partisipasi pemuda dalam organisasi politik, menumbuhkan kembali jiwa bela negara melalui organisasi informal kependuan (kepramukaan), peningkatan prestasi olahraga ditingkat regional, nasional serta internasional menuju Sulawesi Tengah yang sejahtera dan maju.

Disisi lain Daya saing keolahragaan menjadi skala prioritas dalam penentuan Cabang Olahraga Unggulan, pemasalan secara masif terkait tingkat partisipasi masyarakat berolahraga, serta tingkat partisipasi dalam even olahraga Regional, Nasional, dan Global.

Atas dasar rumusan visi, misi dan harapan pembangunan pada tahun 2025-2029 tersebut maka, Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Tengah tentu harus seiring dengan rumusan visi sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Sulawesi Tengah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan pemuda dan olahraga di Sulawesi Tengah terarah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar maju dan berkelanjutan. Masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, sejahtera dan maju serta memiliki spirit juara juga siap berkompetisi dapat ditempuh dengan pendekatan pembangunan olahraga yang lebih berpihak kepada masyarakat luas sehingga ketahanan jangka panjang masyarakat dalam mengarungi kehidupan dapat terwujud. Secara spesifik, arah dan tujuan dalam pembangunan kepemudaan, arah dan tujuan pembangunannya tentu dengan memanfaatkan potensi pemuda sebagai kelompok masyarakat khusus yang merupakan pengisi masa depan bangsa, oleh karena itu dirasa perlu pemerintah untuk kembali mengingatkan rasa

nasionalisme dan identitas diri pemuda dalam hal kebangsaan yang diharapkan pemuda memiliki idealisme tinggi, berakhlak mulia, dan hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok yang mampu memberikan solusi dalam mengatasi persoalan-persoalan kehidupan masyarakat sehari-hari yang jauh dari penyakit sosial, serta tampil sebagai kelompok masyarakat yang memberikan inspirasi dalam membangun kepeloporan/kejuangan, kewirausahaan dan kepemimpinan. Sedangkan di bidang keolahragaan di Sulawesi Tengah ini, tentu dengan memanfaatkan potensi sebagai instrumen pembangunan yang diharapkan dapat berpengaruh secara langsung terhadap perubahan mendasar kehidupan masyarakat secara luas sehingga lebih maju dan berkelanjutan.

Menyikapi berbagai isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan dan tidak meninggalkan persoalan yang belum terselesaikan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah berorientasi pada kinerja sumber daya aparatur dan organisasi, menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menyelenggarakan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga secara terencana, terkoordinasi dan terkendali. Hal ini dimaksud untuk menciptakan aktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien serta lebih siap menghadapi tantangan ke depan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);

13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1096);
21. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 74);
22. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga

- Prestasi Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1057);
23. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67);
 24. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 68);
 25. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 69);
 26. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
 27. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
 28. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 607);
 29. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 782);
 30. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 24);
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

- (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 177, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 163);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
 37. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 TAHUN 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 907);
 38. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Desain Olahraga Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 955).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2025–2029 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik. Dengan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Menjadi pijakan strategis dan operasional bagi segenap lapisan ASN Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk menetapkan prioritas program 5 (lima) tahun kedepan;

2. Menjadi landasan tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan setiap pengampu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta tolok ukur kinerja lima tahun masa akhir jabatan kepala daerah;
3. Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat dicapai secara bertahap (gradual) melalui program-program pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program yang jelas dan terukur;
4. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
5. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) PD setiap tahunnya; dan
6. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan BAPPEDA dan Inspektorat Daerah (APIP) dalam mengendalikan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RENSTRA;

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Perangkat Daerah, yang memuat bahasan tentang Aspek tugas, fungsi dan struktur organisasi, Aspek Sumber daya, serta Aspek pelayanan umum, Standar pelayanan Minimal, Mitra Perangkat Daerah, BUMD yang Mendukung kinerja pelayanan Pemda, Kerjasama Daerah, Subbab Permasalahan Pelayanan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat bahasan tentang kaitan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Perangkat Daerah dan memuat tentang uraian strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang terukur melalui target capaian indikator kinerja;

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini paling sedikit memuat uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi, yang meliputi:

- a. Kepemudaan, terdiri dari :
 - (1) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, serta pemuda kader provinsi; dan
 - (2) pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi.
- b. Keolahragaan terdiri dari :
 - (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
 - (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi;
 - (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; dan
 - (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi.
- c. Kepramukaan yakni pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat provinsi.

Susunan organisasi dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi :
 - (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kepemudaan membawahi :
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Keolahragaan membawahi :
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan membawahi :
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi membawahi :
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Provinsi;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas serta Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;

- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. *Sub Bagian Keuangan dan Aset*

(1) Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

(2) Uraian tugas tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset Meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub bagian Keuangan dan Aset;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan asset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset, dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;

- i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

2. *Sub Bagian Kepegawaian dan Umum*

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
 - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri, dan SKP;
 - f. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan hukum;
 - g. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
 - h. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;

- i. Melaksanakan/mengelola Angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
- j. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- n. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikna laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

c. Bidang Kepemudaan

- (1) Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda
 - c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda;
 - d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemuda, pemberdayaan pemuda dan pembinaan kepoloporan pemuda;

- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan.

d. Bidang Keolahragaan

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, Fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan.
- (2) Uraian tugas Bidang Keolahragaan meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan.

e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan.
- (2) Uraian tugas Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan.

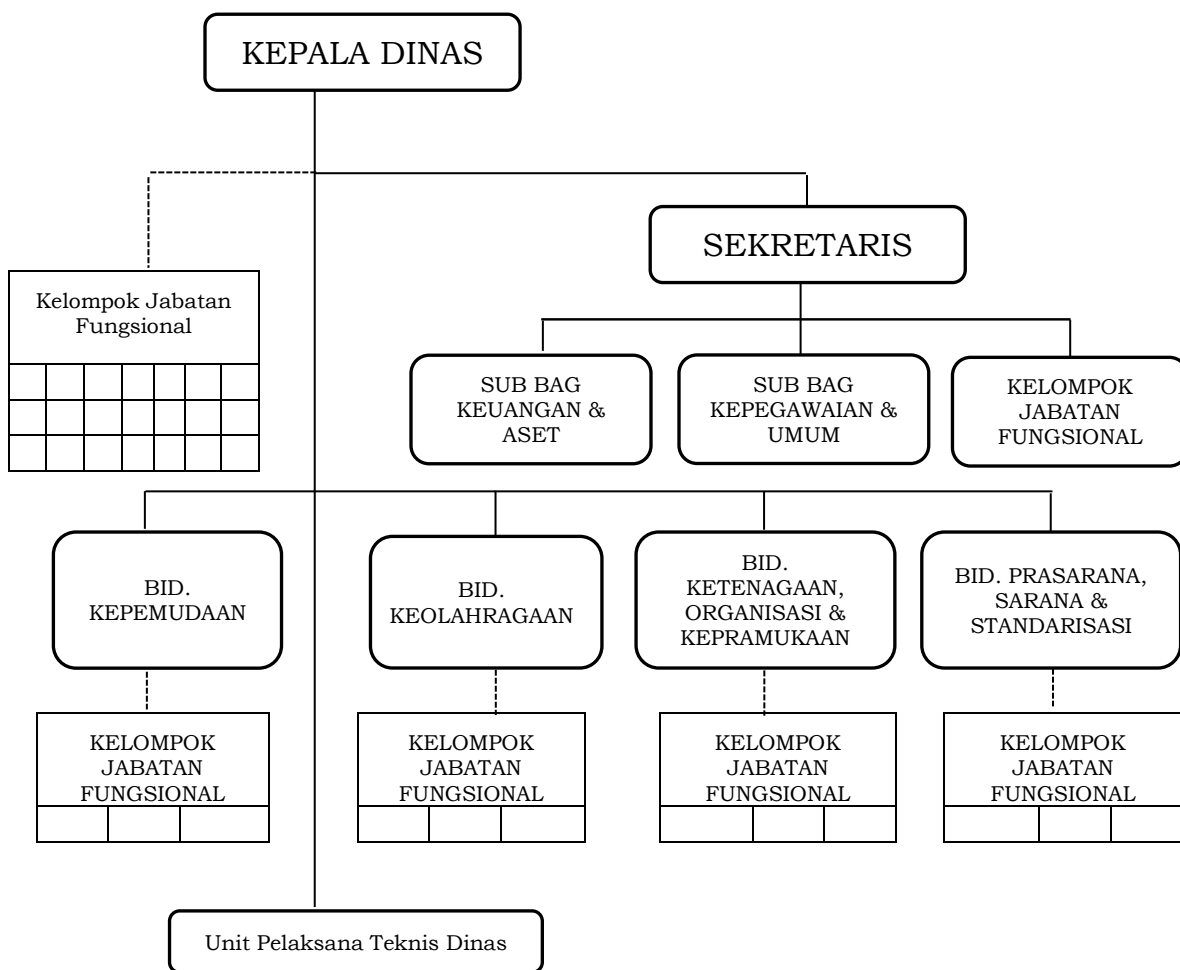
f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Fungsi Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.
- (2) Uraian tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi, mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;

- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

**GAMBAR 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Sumber daya manusia yang tidak terlepas dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi hal yang utama sehingga diperlukan ketersediaan Aparatur yang mempunyai daya saing, berupa nilai inti (core value) ASN BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,

Adaptif, dan Kolaboratif, yang merupakan nilai-nilai dasar dan budaya kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Akronim ini dirancang untuk menjadi pedoman perilaku bagi ASN agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal, bertanggung jawab, dan berkualitas. Berikut adalah penjelasan dari setiap nilai dalam BerAKHLAK : **1). Berorientasi Pelayanan** Berfokus pada pemenuhan dan kepuasan masyarakat, dengan sikap yang ramah, cekatan, solutif, dan terus melakukan perbaikan; **2). Akuntabel** Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta menggunakan kekayaan negara secara bertanggung jawab; **3). Kompeten** Terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri untuk menghadapi tantangan yang berubah, serta membantu orang lain dalam belajar dan bekerja dengan kualitas terbaik; **4). Harmonis** Menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang, suka menolong sesama, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif; **5). Loyal** Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah, serta menjaga nama baik instansi; **6). Adaptif** Cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif; **7). Kolaboratif** Membangun kerja sama yang sinergis untuk memberikan nilai tambah, serta berkontribusi dalam menyelesaikan masalah bersama.

pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan jumlah pegawai sejumlah 94 orang, terdiri dari 12 orang golongan IV, 49 orang golongan III, dan 8 orang golongan II, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Golongan

No.	Golongan/ Ruang	Kondisi Akhir RENSTRA 2021-2024			Kondisi Awal RENSTRA 2021-2026			%
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
1	Golongan IV	-	-	14 Org	8 Org	4 Org	12 Org	(14,29)
2	Golongan III	-	-	56 Org	30 Org	19 Org	49 Org	(12,50)
3	Golongan II	-	-	18 Org	5 Org	3 Org	8 Org	(55,56)
4	Golongan V	-	-	-	4 Org	4 Org	8 Org	100,00
5	Golongan IX	-	-	-	9 Org	8 Org	17 Org	100,00
	Jumlah	-	-	88 Org	56 Org	38 Org	94 Org	6,38

Tabel di atas menggambarkan kondisi jumlah Pegawai per Golongan/Ruang pada periode Renstra sebelumnya dan yang akan datang, dapat disimpulkan bahwa disetiap golongan/ruang terjadi pengurangan yakni pada Golongan IV sampai dengan Golongan II, pengurangan pegawai dikarenakan telah masuk masa pensiun (purna bakti) dan mutasi / promosi, pada sisi penambahan yang diindikasikan dengan adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan	Kondisi Akhir RENSTRA 2021-2024			Kondisi Awal RENSTRA 2025-2029			%
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
S - 3	-	-	-	-	-	-	-
S - 2	-	-	16 Org	11 Org	6 Org	17 Org	6,25
S - 1	-	-	46 Org	29 Org	22 Org	51 Org	10,87
D - 3	-	-	-	-	-	-	-
SLTA/SMK	-	-	26 Org	16 Org	10 Org	26 Org	100,00
SLTP	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	88 Org	56 Org	38 Org	94 Org	6,82

Tabel di atas memberikan gambaran kondidi jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Formal dalam periode Renstra sebelumnya dan 5 (lima) tahun ke depan, dapat disimpulkan bahwa penambahan dari seluruh jenjang pendidikan formal terdapat penambahan kualitas serta kuantitas yang diindikasikan dengan adanya kebutuhan secara personal pegawai dalam meningkatkan kualitas diri sebagai dampak terhadap personal ataupun organisasi juga penambahan dari hasil penempatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Kondisi Akhir RENSTRA 2021-2024			Kondisi Awal RENSTRA 2025-2029			%
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
1.	PNS	55 Org	33 Org	88 Org	43 Org	26 Org	69 Org	(21,59)
2.	PPPK	-	-	-	13 Org	12 Org	25 Org	100,00
Total		55 Org	33 Org	88 Org	56 Org	38 Org	94 Org	6,82

Pada tabel di atas menggambarkan kondisi jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin periode Renstra sebelumnya dan yang akan datang, dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan jumlah PNS antara pria dan wanita sejumlah 19 orang atau (65,38%) sedangkan pada PPPK adanya perbedaan sejumlah 1 orang atau (8,33%), pada tabel ini perbedaan jumlah pria dan wanita yang diindikasikan sebagai bagian kurangnya kesempatan bekerjanya dikalangan wanita ataupun merupakan bagian dari hukum alam dan segala bentuk teoritis bahwa memang adanya dimana-mana peluang pekerjaan lebih diuntungkan pada proporsi pria.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Sarana Prasarana Operasional Sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Aset	Kondisi Akhir RENSTRA 2021-2024		Kondisi Awal RENSTRA 2025-2029		%
		Volume	Jumlah	Volume	Jumlah	
1	Tanah	977.122 M ²	6 Lokasi		8 Lokasi	33,33
2	Peralatan dan Mesin		645 Unit		770 Unit	19,38
3	Gedung dan Bangunan	955 M ²	12 Lokasi		26 Lokasi	116,67
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		3 Lokasi		3 Lokasi	100,00
5	Aset Tetap Lainnya		107 Unit		107 Unit	100,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		2 Unit		2 Unit	100,00

Tabel tersebut memberikan gambaran kondidi jumlah sumber daya pada sisi perolehan aset kurun waktu periode Renstra sebelumnya dan 5 (lima) tahun ke depan, dapat disimpulkan bahwa penambahan nilai perolehan Aset Tanah yakni dari hasil pendataan dan pembuatan sertipikat serta hasil pemetaan. Peralatan dan Mesin bertambah sejumlah 125 unit atau 19,33%. Gedung dan Bangunan dari hasil pendataan kembali yang awalnya pada satu lokasi ada beberapa bangunan diklasifikasikan kembali sehingga terdapat penambahan namun pada periode renstra sebelumnya hanya bertambah Gedung Gelora Bumi Kaktus Andi Raga Pettalolo, dari seluruh perolehan terdapat penambahan kualitas serta kuantitas yang diindikasikan dengan adanya pengembangan Hutan Kota sebagai sentra olahraga.

Tabel 2.5 Pendapatan dan Anggaran Belanja Serta Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (TW III)	1	2	3	4	5	Angg	Real
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	-	-	705.850.000	411.220.000	571.421.279	-	41.900.000	197.700.000	392.399.000	278.588.000	-	-	0,28	0,95	0,49	(0,07)	0,61
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	705.850.000	411.220.000	571.421.279	-	41.900.000	197.700.000	392.399.000	278.588.000	-	-	0,28	0,95	0,49	(0,07)	0,61
Retribusi Daerah	-	-	355.600.000	-	425.392.995	-	41.900.000	197.700.000	285.999.000	242.188.000	-	-	0,56	-	0,57	0,09	0,55
Retribusi Jasa Usaha	-	-	355.600.000	-	425.392.995	-	41.900.000	197.700.000	285.999.000	242.188.000	-	-	0,56	-	0,57	0,09	0,55
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	355.600.000	-	425.392.995	-	41.900.000	197.700.000	285.999.000	242.188.000	-	-	0,56	-	0,57	0,09	0,55
Lain-Lain PAD Yang Sah	-	-	350.250.000	411.220.000	146.028.284	-	-	-	106.400.000	36.400.000	-	-	-	0,26	0,25	(0,25)	(0,42)
Hasil Pemanfaatan Yang Tidak Dipisahkan	-	-	350.250.000	411.220.000	146.028.284	-	-	-	106.400.000	36.400.000	-	-	-	0,26	0,25	(0,25)	(0,42)
BELANJA DAERAH	57.258.173.674	42.154.789.284	41.142.297.010	80.355.415.855	26.221.376.252	55.187.395.186	37.862.495.845	38.269.895.895	78.239.181.060	15.246.775.044	0,96	0,90	0,93	0,97	0,58	(0,14)	(0,23)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.372.403.429	13.310.738.672	14.208.208.921	13.786.895.445	12.874.786.226	11.993.930.204	9.814.643.414	13.051.903.492	12.190.047.057	7.303.793.051	0,90	0,74	0,92	0,88	0,57	(0,01)	(0,09)
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	371.707.325	369.967.050	920.769.575	566.703.800	86.032.050	362.635.925	367.407.472	878.064.323	530.145.900	59.184.885	0,98	0,99	0,95	0,94	0,69	(0,25)	(0,30)
Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	371.707.325	330.446.475	920.769.575	566.703.800	86.032.050	362.635.925	328.069.156	878.064.323	530.145.900	59.184.885	0,98	0,99	0,95	0,94	0,69	(0,25)	(0,30)
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	-	12.001.375	-	-	-	-	11.935.375	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	-	13.520.800	-	-	-	-	13.482.541	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	13.998.400	-	-	-	-	13.920.400	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.389.249.697	8.773.786.658	8.855.680.517	8.886.122.580	9.918.476.659	8.400.141.521	5.434.368.181	7.931.261.466	7.859.244.721	5.534.055.754	0,89	0,62	0,90	0,88	0,56	0,01	(0,08)
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.719.555.822	8.537.077.158	8.716.861.737	8.761.897.680	9.878.856.459	7.782.217.546	5.206.409.314	7.793.722.766	7.737.453.905	5.497.911.054	0,89	0,61	0,89	0,88	0,56	0,03	(0,07)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	669.693.875	171.732.950	93.819.030	-	-	617.923.975	163.103.779	92.538.950	-	-	0,92	0,95	0,99	-	-	(0,48)	(0,47)
Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	64.976.550	44.999.750	124.224.900	-	-	64.855.088	44.999.750	121.790.816	-	-	1,00	1,00	0,98	-	0,24	0,23
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	39.620.200	-	-	-	-	36.144.700	-	-	-	-	0,91	-	-
Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	209.641.950	204.568.950	309.968.200	67.364.800	-	189.915.512	195.679.218	237.320.842	17.194.800	-	0,91	0,96	0,77	0,26	(0,25)	(0,45)
Sub Kegiatan pengamanan barang milik daerah	-	174.007.100	165.654.600	309.968.200	-	-	154.880.662	158.562.568	237.320.842	-	-	0,89	0,96	0,77	-	0,21	0,15

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (TW III)	1	2	3	4	5	Angg	Real
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	-	35.634.850	18.414.800	-	-	-	35.034.850	16.714.800	-	-	-	0,98	0,91	-	-	(0,28)	(0,31)
Sub Kegiatan koordinasi dan penialain barang milik daerah SKPD	-	-	4.999.850	-	-	-	-	4.951.850	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-
Sub Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	-	-	15.499.700	-	67.364.800	-	-	15.450.000	-	17.194.800	-	-	1,00	-	0,26	1,08	0,05
Kegiatan Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	-	4.438.800	-	-	-	-	3.459.000	-	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan penyuluhan dan peyeralbuasan kebijakan retribusi daerah	-	4.438.800	-	-	-	-	3.459.000	-	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.634.625	323.124.000	56.099.950	121.942.450	8.160.000	44.253.550	287.192.929	44.602.368	111.622.420	3.268.000	0,56	0,89	0,80	0,92	0,40	(0,36)	(0,41)
Sub Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	211.890.000	-	-	-	-	211.328.750	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	30.261.000	50.100.000	121.942.450	-	-	-	39.164.018	111.622.420	-	-	0,00	0,78	0,92	-	0,59	0,69
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.954.625	8.835.000	-	-	-	2.999.950	8.835.000	-	-	-	0,11	1,00	-	-	-	(0,44)	0,72
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50.680.000	72.138.000	-	-	-	41.253.600	67.029.179	-	-	-	0,81	0,93	-	-	-	0,19	0,27
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	5.999.950	-	-	-	-	5.438.350	-	-	-	-	0,91	-	-	-	-
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	8.160.000	-	-	-	-	3.268.000	-	-	-	-	0,40	-	-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.083.923.980	430.957.300	509.481.450	231.371.500	5.360.000	1.031.355.250	425.541.300	501.630.000	126.633.000	-	0,95	0,99	0,98	0,55	0,00	(0,65)	(0,41)
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.083.923.980	-	-	231.371.500	-	1.031.355.250	-	-	126.633.000	-	0,95	-	-	0,55	-	(0,54)	(0,65)
Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	25.500.000	-	-	-	-	20.460.000	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan pengadaan mebel	-	9.000.000	-	-	-	-	8.999.325	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	396.457.300	509.481.450	-	5.360.000	-	396.081.975	501.630.000	-	-	-	1,00	0,98	-	0,00	0,13	0,13
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.929.551.302	2.354.581.250	2.312.541.250	2.898.323.700	2.314.667.900	1.645.380.658	2.304.518.737	2.196.316.736	2.582.955.249	1.359.260.026	0,85	0,98	0,95	0,89	0,59	0,04	(0,04)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.929.551.302	-	14.999.800	-	52.720.000	1.645.380.658	-	13.690.914	-	47.290.000	0,85	-	0,91	-	0,90	(0,70)	(0,69)
Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	717.094.250	862.910.400	734.037.200	713.820.400	-	697.500.737	765.170.772	520.400.429	381.704.526	-	0,97	0,89	0,71	0,53	(0,00)	(0,14)
Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	1.637.487.000	1.415.882.000	2.164.286.500	1.548.127.500	-	1.607.018.000	1.398.706.000	2.062.554.820	930.265.500	-	0,98	0,99	0,95	0,60	(0,01)	(0,13)
Sub Kegiatan penyediaan surat menyurat	-	-	18.749.050	-	-	-	-	18.749.050	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	334.947.464	694.615.729	97.633.215	212.561.917	-	298.692.783	667.197.581	97.622.325	106.813.017	-	0,89	0,96	1,00	0,50	(0,11)	(0,23)
Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	22.121.889	10.938.413	-	-	-	22.099.711	10.938.413	-	-	-	1,00	1,00	-	-	(0,30)	(0,30)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (TW III)	1	2	3	4	5	Angg	Real
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	35.554.100	302.494.424	97.633.215	37.911.917	-	35.073.976	301.637.174	97.622.325	36.579.617	-	0,99	1,00	1,00	0,96	0,02	0,01
Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	10.224.975	36.181.050	-	-	-	10.118.975	36.181.050	-	-	-	0,99	1,00	-	-	0,88	0,89
Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	13.200.000	-	-	-	-	13.200.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	-	11.670.000	39.566.842	-	-	-	11.670.000	39.566.842	-	-	-	1,00	1,00	-	-	0,84	0,84
Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	242.176.500	288.635.000	-	174.650.000	-	206.530.121	262.074.102	-	70.233.400	-	0,85	0,91	-	0,40	(0,10)	(0,30)
Sub Kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	-	-	16.800.000	-	-	-	-	16.800.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	519.336.500	509.294.200	654.451.500	674.830.000	262.162.900	510.163.300	503.547.500	637.151.800	644.502.600	224.016.569	0,98	0,99	0,97	0,96	0,85	(0,13)	(0,15)
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	519.336.500	-	218.700.000	-	-	510.163.300	-	217.900.000	-	-	0,98	-	1,00	-	-	(0,35)	(0,35)
Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	345.445.200	387.942.600	674.830.000	262.162.900	-	339.797.500	385.863.600	644.502.600	224.016.569	-	0,98	0,99	0,96	0,85	(0,07)	(0,10)
Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	66.000.000	27.808.900	-	-	-	66.000.000	20.188.200	-	-	-	1,00	0,73	-	-	(0,35)	(0,45)
Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	97.849.000	-	-	-	-	97.750.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan pemeliharaan aset tak berwujud	-	-	20.000.000	-	-	-	-	13.200.000	-	-	-	-	0,66	-	-	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.897.369.270	3.516.250.538	3.389.609.356	1.964.018.416	229.485.335	1.812.843.044	3.450.711.788	3.166.362.217	1.848.494.044	22.246.930	0,96	0,98	0,93	0,94	0,10	(0,34)	(0,59)
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Propinsi	1.717.369.495	3.466.250.538	3.305.609.356	1.894.018.416	210.886.535	1.635.898.869	3.401.138.021	3.083.236.057	1.779.475.964	22.246.930	0,95	0,98	0,93	0,94	0,11	(0,34)	(0,58)
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor provinsi	116.400.000	29.997.000	59.998.850	-	-	115.309.000	29.895.000	45.922.850	-	-	0,99	1,00	0,77	-	-	(0,20)	(0,26)
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda provinsi	104.761.000	97.669.500	102.497.900	-	41.274.150	101.627.000	95.359.500	98.617.900	-	-	0,97	0,98	0,96	-	0,00	(0,01)	(0,01)
Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader provinsi	66.683.000	46.619.000	159.999.720	-	-	64.693.000	45.859.700	154.034.216	-	-	0,97	0,98	0,96	-	-	0,34	0,34
Sub Kegiatan Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	1.036.816.045	2.199.846.300	-	-	-	977.137.519	2.170.546.396	-	-	-	0,94	0,99	-	-	-	0,46	0,49
Sub Kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan provinsi	357.685.450	964.403.038	1.041.666.013	822.877.260	38.476.950	343.478.350	946.868.725	984.337.400	763.842.399	854.550	0,96	0,98	0,94	0,93	0,02	(0,36)	(0,70)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (TW III)	1	2	3	4	5	Angg	Real
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan pemberian penghargaan kepada pemuda dan organisasi pemuda provinsi yang Berprestasi	35.024.000	54.992.500	49.999.700	-	-	33.654.000	54.752.500	32.251.700	-	-	0,96	1,00	0,65	-	-	0,13	(0,01)
Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi rencana aksi daerah/RAD tingkat provinsi	-	72.723.200	299.999.550	118.191.650	-	-	57.856.200	279.672.130	114.216.624	-	-	0,80	0,93	0,97	-	0,18	0,25
Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	-	-	1.591.447.623	-	-	-	-	1.488.399.861	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Provinsi	-	-	-	720.000.256	23.697.135	-	-	-	676.465.235	-	-	-	-	0,94	0,00	(0,82)	(1,00)
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	-	-	-	84.674.250	107.438.300	-	-	-	80.744.306	21.392.380	-	-	-	0,95	0,20	0,13	(0,49)
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirasaha muda tingkat provinsi	-	-	-	148.275.000	-	-	-	-	144.207.400	-	-	-	-	0,97	-	-	-
Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi	179.999.775	50.000.000	84.000.000	70.000.000	18.598.800	176.944.175	49.573.767	83.126.160	69.018.080	-	0,98	0,99	0,99	0,99	0,00	(0,36)	(0,21)
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	91.000.000	50.000.000	54.000.000	-	18.598.800	87.944.400	49.573.767	53.126.160	-	-	0,97	0,99	0,98	-	0,00	(0,16)	(0,15)
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi	88.999.775	-	30.000.000	-	-	88.999.775	-	30.000.000	-	-	1,00	-	1,00	-	-	(0,42)	(0,42)
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	-	-	-	70.000.000	-	-	-	-	69.018.080	-	-	-	-	0,99	-	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	41.162.001.075	24.707.800.224	21.994.478.733	63.584.501.994	11.591.258.991	40.557.220.338	23.983.853.679	20.531.861.686	63.234.951.939	7.409.335.063	0,99	0,97	0,93	0,99	0,64	(0,22)	(0,29)
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi	16.175.630.050	6.090.112.767	6.279.154.050	1.405.751.462	48.171.669	15.635.759.313	5.521.635.117	5.824.172.701	1.378.678.618	10.302.000	0,97	0,91	0,93	0,98	0,21	(0,69)	(0,77)
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan menengah dan khusus	513.836.025	-	-	-	-	490.869.525	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga provinsi	15.661.794.025	5.837.112.792	5.289.155.059	1.405.751.462	48.171.669	15.144.889.788	5.521.635.117	4.870.668.274	1.378.678.618	10.302.000	0,97	0,95	0,92	0,98	0,21	(0,69)	(0,77)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (TW III)	1	2	3	4	5	Angg	Real
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	-	252.999.975	989.998.991	-	-	-	-	953.504.427	-	-	-	0,00	0,96	-	-	0,98	-
Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga	346.618.875	5.514.652.457	1.731.824.683	5.621.691.024	1.129.590.515	327.373.675	5.366.834.964	1.664.141.513	5.425.594.409	1.011.216.113	0,94	0,97	0,96	0,97	0,90	0,27	0,25
Sub Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat provinsi	185.432.125	1.441.279.623	953.758.633	-	-	182.166.525	1.432.022.627	942.134.743	-	-	0,98	0,99	0,99	-	-	0,73	0,73
Sub Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan pekan paralimpik provinsi dan pekan paralimpik pelajar provinsi	161.186.750	-	78.066.450	-	-	145.207.150	-	71.004.390	-	-	0,90	-	0,91	-	-	(0,30)	(0,30)
Sub Kegiatan partisipasi & keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan dalam multi even dan single event	-	4.073.372.834	699.999.600	-	-	-	3.934.812.337	651.002.380	-	-	-	0,97	0,93	-	-	(0,59)	(0,59)
Sub Kegiatan Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	-	-	-	3.512.013.008	-	-	-	-	3.353.528.893	-	-	-	-	0,95	-	-	-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	-	-	-	2.109.678.016	1.129.590.515	-	-	-	2.072.065.516	1.011.216.113	-	-	-	0,98	0,90	(0,27)	(0,30)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	296.942.650	79.000.000	89.999.950	809.859.158	370.204.857	277.831.650	79.000.000	89.418.270	732.696.098	-	0,94	1,00	0,99	0,90	0,00	2,00	0,27
Sub Kegiatan Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi provinsi	46.425.000	79.000.000	9.999.950	-	-	45.221.000	79.000.000	9.418.270	-	-	0,97	1,00	0,94	-	-	(0,40)	(0,41)
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga	250.517.650	-	-	-	-	232.610.650	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	-	-	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan data keolahragaan terpadu di provinsi	-	-	-	809.859.158	370.204.857	-	-	-	732.696.098	-	-	-	-	0,90	0,00	-	-
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	24.342.809.500	13.024.035.000	13.893.500.050	55.747.200.350	10.043.291.950	24.316.255.700	13.016.383.598	12.954.129.202	55.697.982.814	6.387.816.950	1,00	1,00	0,93	1,00	0,64	0,23	(0,23)
Sub Kegiatan standarisasi organisasi keolahragaan	117.101.875	99.035.000	70.000.050	-	-	103.230.875	95.286.518	60.048.140	-	-	0,88	0,96	0,86	-	-	(0,16)	(0,17)
Sub Kegiatan Pengembangan organisasi keolahragaan	23.902.400.000	12.925.000.000	13.823.500.000	-	-	23.902.352.000	12.921.097.080	12.894.081.062	-	-	1,00	1,00	0,93	-	-	(0,17)	(0,19)
Sub Kegiatan Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait	323.307.625	-	-	55.616.999.700	10.043.291.950	310.672.825	-	-	55.586.536.238	6.387.816.950	0,96	-	-	1,00	0,64	2,14	1,74
Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi	-	-	-	130.200.650	-	-	-	-	111.446.576	-	-	-	-	0,86	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (TW III)	1	2	3	4	5	Angg	Real
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	826.399.900	619.999.850	1.550.000.000	1.020.000.000	1.525.845.700	823.401.600	613.286.964	1.519.768.500	965.688.020	511.400.000	1,00	0,99	0,98	0,95	0,34	0,13	(0,09)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	826.399.900	619.999.850	1.550.000.000	1.020.000.000	1.525.845.700	823.401.600	613.286.964	1.519.768.500	965.688.020	511.400.000	1,00	0,99	0,98	0,95	0,34	0,13	(0,09)
Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan provinsi	264.700.000	350.000.000	1.450.000.000	-	1.525.845.700	263.950.000	349.389.813	1.450.000.000	-	511.400.000	1,00	1,00	1,00	-	0,34	0,55	0,18
Sub Kegiatan penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah provinsi	516.200.000	-	-	-	-	516.200.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	45.499.900	-	-	-	-	43.251.600	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	-	70.000.000	50.000.000	1.020.000.000	-	-	69.989.951	49.500.000	965.688.020	-	-	1,00	0,99	0,95	-	1,44	1,40
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	-	199.999.850	50.000.000	-	-	-	193.907.200	20.268.500	-	-	-	0,97	0,41	-	-	(0,50)	(0,68)
JUMLAH KESELURUHAN	57.258.173.674	42.154.789.284	41.142.297.010	80.355.415.855	26.221.376.252	55.187.395.186	37.862.495.845	38.269.895.895	78.239.181.060	15.246.775.044	0,96	0,90	0,93	0,97	0,58	(0,14)	(0,23)

Kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) adalah generasi muda, sementara mitra yang terlibat dalam pemberian pelayanan meliputi organisasi pemuda, organisasi olahraga, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya, yang bekerja sama dengan Dispora untuk menyelenggarakan program-program kepemudaan dan keolahragaan.

Kelompok Sasaran Pelayanan Dispora :

1. Pemuda dan Remaja : Ini adalah kelompok utama yang menjadi target program pengembangan kepemimpinan, keterampilan, pemberdayaan, dan kegiatan positif lainnya.
2. Atlet dan Masyarakat Olahraga : Dispora juga melayani atlet serta masyarakat yang aktif dalam kegiatan olahraga, baik secara individu maupun berkelompok.
3. Penyelenggara Kepemudaan dan Olahraga : Pihak-pihak seperti organisasi pemuda dan organisasi olahraga juga merupakan bagian dari kelompok sasaran yang perlu mendapatkan dukungan dari Dispora.

Mitra Dispora dalam Pemberian Pelayanan :

1. Organisasi Kepemudaan dan Olahraga : Organisasi-organisasi ini sering menjadi mitra strategis Dispora dalam melaksanakan program dan kegiatan, termasuk penyediaan fasilitas dan pembinaan.
2. Instansi Pendidikan: Sekolah dan perguruan tinggi berperan penting dalam menyalurkan program kepemudaan dan olahraga ke peserta didik
3. Dunia Usaha dan Industri: Perusahaan dapat menjadi mitra dalam pengembangan kewirausahaan muda melalui pelatihan keterampilan dan modal.
4. Pemerintah Pusat dan Daerah: Koordinasi dengan kementerian terkait dan dinas di tingkat daerah adalah mitra penting dalam mengelola urusan kepemudaan dan olahraga
5. Komunitas dan Masyarakat Luas : Keterlibatan masyarakat dalam bentuk kelompok atau komunitas dapat mendukung dan memperluas jangkauan pelayanan Dispora

Kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kinerjanya. Adapun tingkat capaian kinerja Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 4 (empat) tahun terakhir yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci

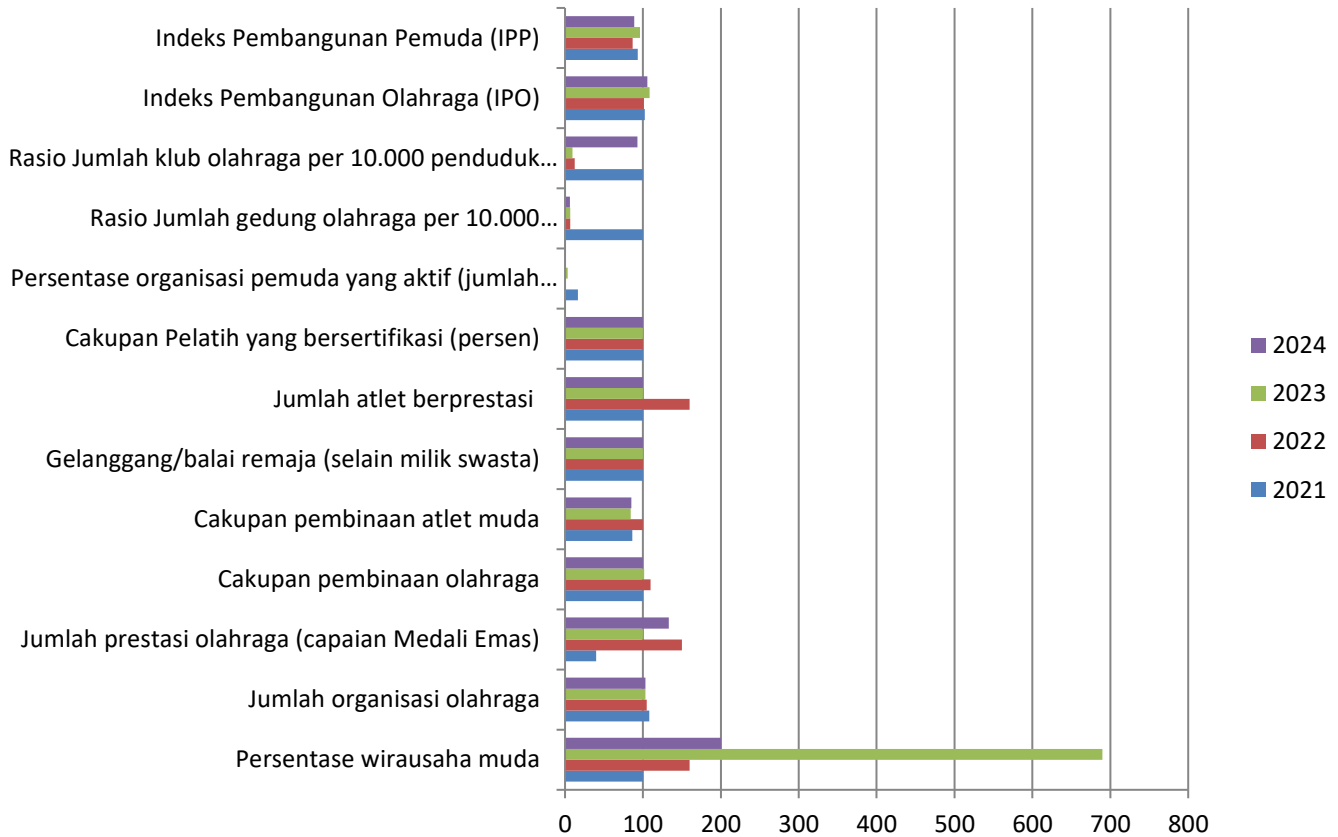
(IKK), Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terdapat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Capaian Kinerja												Rata-rata Target RENSTRA	Interpretasi
		2021			2022			2023			2024				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
A.	Indikator Wajib														
1.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	58,01	54,17	93,38	60,18	52,17	86,69	62,35	60,00	96,23	64,52	57,33	88,81	61,27	Belum Tercapai
2.	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,408	0,417	102,21	0,376	0,381	101,33	0,327	0,355	108,56	0,386	0,408	105,70	149,70	Melampaui
3.	Rasio Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk (Angka)	0,04	0,04	100,00	0,057	0,007	12,28	0,072	0,007	9,72	0,086	0,080	93,02	53,76	Belum Tercapai
4.	Rasio Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk (Angka)	0,147	0,147	100,00	0,15	0,01	6,76	0,152	0,01	6,58	0,158	0,01	6,33	29,92	Belum Tercapai
5.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi)	2,00	0,33	16,50	54,00	0,33	0,61	56,00	2,00	3,57	58,00	0,00	0,00	5,17	Belum Tercapai
6.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (persen)	12,00	12,00	100,00	15,00	15,00	100,00	20,00	20,00	100,00	25,00	25,00	100,00	100,00	Melampaui
7.	Jumlah atlet berprestasi	15,00	15,00	100,00	20,00	32,00	160,00	25,00	25,00	100,00	30,00	30,00	100,00	115,00	Melampaui
8.	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	18,00	18,00	100,00	20,00	20,00	100,00	22,00	22,00	100,00	24,00	24,00	100,00	100,00	Melampaui
9.	Cakupan pembinaan atlet muda	37	32	86,49	32	32	100,00	32	27	84,38	27	23	85,19	65,00	Belum Tercapai
10.	Cakupan pembinaan olahraga	55	55	100,00	60	66	110,00	65	66	101,54	66	66	100,00	196,50	Melampaui
11.	Jumlah prestasi olahraga (capaian Medali Emas)	5	2	40,00	10	15	150,00	5	5	100,00	15	20	133,33	23,75	Belum Tercapai
12.	Jumlah organisasi olahraga	60	65	108,33	62	65	104,84	64	66	103,13	66	68	103,03	206,50	Melampaui
13.	Persentase wirausaha muda	20	20	100,00	20	32	160,00	20	138	690,00	20	40	200,00	107,75	Melampaui

Gambar Grafik 2.2

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Tahun 2021-2024**



Pada tabel di atas dapat dijelaskan terkait target dan pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah pada periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 yang terdiri dari 13 (tiga belas) Indikator Wajib, yang mana pada tahun-tahun tertentu terjadi penurunan realisasi dan rasio capaiannya dan bahkan ada pula yang tidak terealisasi.

Namun disisi lain dari beberapa Indikator tersebut tidak mengalami penurunan yang signifikan terhadap realisasi capaiannya tetapi tidak pula meningkat, sehingga dapat dikatakan stabil, berikut adalah penjelasan dari 13 (tiga belas) Indikator tersebut :

1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

indikasi tidak adanya realisasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 bisa berarti belum adanya laporan resmi atau data yang tersedia mengenai capaian IPP pada tahun tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa poin yang perlu diperhatikan : ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti *keterlambatan penyusunan laporan*, Penyusunan IPP terutama yang berskala nasional, memerlukan proses pengumpulan data yang komprehensif dari berbagai daerah. Keterlambatan dalam

penyusunan laporan ini bisa menyebabkan indikasi belum adanya realisasi pada tahun tertentu. Adanya *kendala dalam pengumpulan data*, beberapa daerah mungkin mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk IPP, terutama jika melibatkan variabel-variabel yang kompleks atau membutuhkan survei khusus. Atau *perubahan metodologi penilaian*, Jika ada perubahan metodologi dalam penghitungan IPP, data dari tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak bisa dibandingkan secara langsung. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan mengenai capaian pembangunan pemuda. Namun, perlu diingat bahwa belum adanya laporan resmi tidak selalu berarti tidak ada pembangunan pemuda sama sekali.

2. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Rata-rata capaian IPO selama 4 (empat) tahun berturut-turut mencapai ataupun mengalami peningkatan di atas rata-rata Nasional, ini menunjukkan bahwa sangat berdampak pada usia harapan hidup dan tingkat kebugaran masyarakat Sulawesi Tengah sangat baik.

3. Rasio Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk (Angka)

Capainnya masih terasa kurang dalam pengembangan ataupun pelaksanaan secara masif untuk memberikan kontribusi prestasi olahraga.

4. Rasio Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk (Angka)

Sama halnya IKK tersebut sangat berkorelasi terhadap IKK sebelumnya dimana jumlah gedung olahraga yang representatif mendukung tercapainya atlet-atlet berprestasi.

5. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda).

Indikasi organisasi pemuda tidak aktif meliputi menurunnya partisipasi anggota, jarang diadakannya kegiatan, tidak adanya program pengembangan diri, hilangnya interaksi sosial antaranggota, dan tidak tercapainya tujuan organisasi, yang mengindikasikan berkurangnya minat dan keaktifan dalam kegiatan organisasi tersebut.

6. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi.

Tercapainya cakupan pelatih yang bersertifikasi antara lain adalah meningkatnya jumlah pelatih yang tersertifikasi sesuai standar yang ditetapkan, serta terdistribusinya pelatih bersertifikasi secara merata di berbagai sektor atau wilayah untuk memenuhi kebutuhan kompetensi tenaga kerja atau perkembangan olahraga. Indikator lain termasuk terwujudnya standar kompetensi pelatih yang terstandar dan diakui secara nasional maupun internasional.

7. Jumlah Atlet berprestasi.
Indikator tercapainya jumlah atlet berprestasi meliputi jumlah atlet yang lolos seleksi dan masuk ke tingkat nasional/internasional, peningkatan jumlah atlet junior yang menjadi atlet elite, serta meningkatnya perolehan medali di kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Selain itu, peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi serta terciptanya program pembinaan atlet muda yang efektif juga dapat menjadi indikator keberhasilan.
8. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta).
Kemampuan daya saing kepemudaan mendorong pencapaian ketersediaan tempat/wadah pemuda tempat berkumpul atau berlatih dalam kemandirian.
9. Cakupan Pembinaan Atlet Muda.
tercapainya cakupan pembinaan atlet muda meliputi: peningkatan kualitas dan kuantitas atlet berprestasi, yang diukur melalui persentase atlet muda yang mengikuti program pembinaan dan kompetisi tingkat daerah, wilayah, dan nasional, serta persentase peningkatan kompetensi dan peningkatan prestasi atlet secara keseluruhan.
10. Cakupan Pembinaan Olahraga.
jumlah individu (atlet, pelatih, atau kelompok) yang terlibat, jumlah kegiatan olahraga yang diselenggarakan, dan perolehan prestasi dalam berbagai kejuaraan tingkat lokal hingga nasional, yang semuanya mencerminkan pengembangan potensi olahraga secara berkelanjutan.
11. Jumlah prestasi olahraga (capaian medali emas).
Indikator tercapainya jumlah prestasi olahraga yang diukur dari capaian medali emas adalah jumlah medali emas yang diperoleh atlet atau tim dalam suatu event olahraga regional atau internasional. Untuk mengukur capaian ini, dilakukan penghitungan jumlah medali emas yang didapatkan dan pencatatan peringkat yang diraih.
12. Jumlah organisasi olahraga.
Indikator tercapainya jumlah organisasi olahraga dapat diukur dari jumlah organisasi yang aktif, terdaftar, memiliki struktur yang jelas, menjalankan program secara rutin, dan memiliki anggota aktif. Selain itu, jumlah organisasi yang berkontribusi pada pengembangan cabang olahraga tertentu melalui pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan kompetensi juga menjadi indikator keberhasilan.
13. Persentase Wirausaha Muda.

Indikator tercapainya persentase wirausaha muda meliputi peningkatan rasio kewirausahaan (misalnya, mencapai 4% atau lebih sesuai target negara maju), pertumbuhan jumlah wirausaha muda, dan efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan jumlah wirausaha melalui ketercapaian tujuan program seperti peningkatan pemahaman, ketepatan sasaran, dan perubahan nyata.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis

Pada umumnya Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga di Sulawesi Tengah mempunyai fokus sasaran yang sama dengan Renstra Kab/Kota dan Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu menyelenggarakan fasilitasi olahraga dan pemuda.

Permasalahan pembangunan dalam urusan kepemudaan dan olahraga meliputi sebagai berikut :

1. Rendahnya partisipasi pemuda Sulawesi Tengah dalam lapangan dan kesempatan kerja;
2. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan;
3. Belum optimalnya penanganan kesetaraan dan diskriminasi gender;
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
5. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional (SPOPNAS), dan Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
6. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan; dan
7. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Sulawesi Tengah yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Adanya rencana struktur dan pola ruang yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, dampak dan resiko lingkungan hidup, ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim serta ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dampak terhadap pembinaan olahraga dan pemuda adalah masih kurangnya fasilitas olahraga dan pemuda berupa fungsi lapangan olahraga dan lapangan / gedung graha kegiatan kepemudaan yang belum termanfaatkan secara maksimal dikarenakan dampak dari bencana alam. Kondisi tersebut bertambahnya beban Dinas

Pemuda dan Olahraga untuk pemeliharaan fasilitas yang ada, pembangunan gedung olahraga, pengadaan sarana, dan sebagainya serta gedung graha pemuda juga membangkitkan wirausaha pemuda. Lebih dari itu upaya meningkatkan prestasi melalui pemasukan dan kegiatan latihan menjadi lebih baik.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

- a) Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan juga keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab; dan
- b) Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan kepemudaan juga keolahragaan dilaksanakan melalui tahapan pengenalan, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan pengembangan prestasi.

Berikut tabel Isu Strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode tahun 2025–2029, sebagai berikut :

TABEL 2.7 ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<p>I. Kepemudaan</p> <p>1. Pemuda Pelopor bidang pengembangan Pangan</p> <p>2. Indeks Lapangan dan Kesempatan Kerja</p> <p>3. Ajang kreativitas pemuda Nasional</p> <p>4. Pertukaran Pemuda Antar Negara Tingkat Nasional</p>	<p>Belum adanya Prasarana dan sarana pembinaan Pemuda</p> <p>Belum terfokusnya pembinaan Pemuda</p> <p>Belum adanya ajang Entrepreneurship Kepemudaan sebagai wadah cikal bakal Wirausaha mandiri</p>	<p>Penataan Lokasi (site eksisting) ex. STQ peruntukan Graha Pemuda</p>	<p>Perubahan iklim, polusi, dan keanekaragaman hayati. Generasi muda memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini melalui aksi-aksi konkret dan advokasi, serta perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah dan organisasi terkait.</p>	<p>Perubahan iklim, polusi, dan keanekaragaman hayati. Pemuda sering dianggap sebagai "penentu masa depan" dan menunjukkan keprihatinan kuat terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Isu-isu ini penting karena pemuda dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah lingkungan dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan.</p>	<p>Perubahan iklim, polusi, dan keberlanjutan lingkungan. Pemuda berperan penting dalam mengatasi masalah ini melalui edukasi, advokasi, dan tindakan nyata.</p>	<p>Meningkatkan peran serta pemuda dalam setiap sektor sumber daya didalam menghadapi tantangan global, nasional dan regional</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
II. Keolahragaan						
1. Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Pra POPNAS)	Sistem pembinaan atlet yang belum terintegrasi melalui Desain Besar Olahraga Nasional serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kurangnya alokasi perawatan ataupun perbaikan fasilitas olahraga	Perubahan iklim, polusi, dan degradasi ekosistem. Perubahan iklim seperti peningkatan suhu dan cuaca ekstrem berdampak langsung pada pelaksanaan olahraga, khususnya olahraga di luar ruangan dan olahraga musim dingin. Polusi udara dan air dapat mempengaruhi kesehatan atlet dan kualitas lingkungan tempat olahraga berlangsung	Perubahan iklim, pencemaran udara dan air, degradasi lahan, dan dampak infrastruktur olahraga terhadap ekosistem. Selain itu, juga penting untuk memperhatikan pengelolaan sampah, kelestarian biodiversity, dan mitigasi dampak olahraga terhadap lingkungan	Dampak pembangunan infrastruktur olahraga, perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dampak pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan stadion atau arena olahraga, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, peningkatan sampah, dan polusi.	Pengembangan olahraga, peningkatan kualitas SDM olahraga, pemanfaatan teknologi, serta perubahan iklim.
2. Pekan Olahraga Nasional (PON)	Kurangnya Tenaga Olahraga (TENOR) Pelatih, Wasit dan Juri yang bersertifikasi Nasional/Internasional	Penataan Lokasi (site eksisting) olahraga Hutan Kota (arboretum)				
3. Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS)	Belum terbentuknya Organisasi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kab/Kota sebagai cikal bakal olahraga prestasi di Sulawesi Tengah					
4. Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS)	Prasarana dan Sarana yang belum memadai atau representatif dalam proses latihan atlet dan kejuaran					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
III. Kepramukaan 1. Jumlah anak usia sekolah dan terdata dalam organisasi kepramukaan	Kurangnya pembinaan secara berkelanjutan (terus-menerus) dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) Kurangnya tenaga pembina serta prasarana dan sarana	Penataan Lokasi (site eksisting) ex. STQ peruntukan perkemahan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sampah. Pramuka dapat berperan dalam pendidikan lingkungan, aksi nyata pelestarian lingkungan, dan pengembangan kesadaran lingkungan di masyarakat.	Perubahan iklim, pencemaran, dan penanganan bencana. Pramuka, dengan prinsip peduli lingkungan, dapat berperan dalam edukasi, mitigasi, dan adaptasi terhadap isu-isu tersebut.	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah, polusi, dan konsumsi yang bertanggung jawab. Pramuka dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan melalui berbagai program, seperti Eco Scouting Cyber Movement (ESCYMO) dan Saka Kalpataru	Perubahan lingkungan fisik seperti bencana alam, pemanasan global, pencemaran air dan udara, perubahan iklim, sampah, gaya hidup hijau, akan sangat berpengaruh pada tata kelola dan sistem pendidikan kepramukaan. Meningkatnya kesadaran generasi dan minat muda terhadap isu-isu sosial, kebangsaan, lingkungan, kualitas SDM dan kepemimpinan merupakan peluang Gerakan Pramuka untuk tetap diminati anak, remaja dan pemuda

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, kemitraan, sarana dan prasarana, menyelenggarakan urusan olahraga dan pemuda, pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda, pengkoordinasian. Terdapat permasalahan yang dapat di identifikasikan berdasarkan Tugas dan fungsi sebagai berikut :

Upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dibidang pembinaan olahraga dan pemuda.

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai suatu impact/outcome, dengan demikian sasaran jangka menengah Tahun 2020-2024 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan Pemuda, dengan indikator :
 - a. Indeks Pembangunan Pemuda;
 - b. Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan;
 - c. Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda;
 - d. Tingkat pencegahan perilaku berisiko pemuda;
 - e. Persentase pemuda berwirausaha.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan meningkatnya prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional, indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase penduduk 10 tahun keatas yang berolahraga;
 - b. Peringkat pada Asian Games;
 - c. Peringkat pada Asian Para Games;
 - d. Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games;
 - e. Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games;
 - f. Peringkat pada SEA Games;
 - g. Peringkat pada ASEAN Paragames.

Penelaahan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga yang mempengaruhi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan Daerah

di Provinsi Sulawesi Tengah dimana permasalahan tersebut terurai dimasyarakat sehingga dapat dirangkai menjadi suatu isu strategis melalui proses peninjauan dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L;
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk mengurai permasalahan didalam proses pelayanan kepemudaan dan keolahragaan yakni : menyiapkan format data yang terintegrasi pada teknologi informasi yang dapat terukur, mendorong kaum muda sebagai bagian kewiraswastaan (entrepreneurship), serta keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) pada masing-masing Kab/Kota di Sulawesi Tengah. Pada bagian keolahragaan, mengoptimalkan peran swasta dalam olahraga industri serta peningkatan seluruh peran elemen pelaku olahraga dalam membudayakan olahraga pada masyarakat.

Kaitannya dengan Renstra K/L yaitu meningkatkan peran pemuda dalam berinovasi pada bidang-bidang yang digemari untuk mencapai kemandirian dan berdaya saing, sedangkan dibagian lain pemudapun diharapkan dapat berperan kebugaran jasmani dalam mencapai prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keuangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana pemuda dan olahraga yang memadai. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perencanaan kedepan. Permasalahan sebagai wilayah yang luasnya tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah, tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggung jawaban kepada stakeholder mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai penyelenggaraan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Fungsi dan kedudukan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 terhadap perencanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dengan memperhatikan RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045.
2. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja atau (Renja) serta penganggaran tahun 2025-2029.

Dalam rangka peningkatan kualitas Pembangunan di Sulawesi Tengah sesuai visi Pembangunan Sulawesi Tengah serta memperhatikan 5 (lima) tujuan bersama (*Common Goal*) prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, yang diimplementasikan melalui agenda 9 (sembilan) Program Besar yakni :

1. Berani Cerdas;
2. Berani Sehat;
3. Berani Sejahtera;
4. Berani Lancar;
5. Berani Menyala
6. Berani Makmur;

7. Berani Berkah;
8. Berani Harmoni; dan
9. Berani Berintegritas.

Dalam rangka pencapaian Misi 1 dengan kesinambungan program besar pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah maka, Dinas Pemuda Dan Olahraga diletakkan sebagai mendukung Program **“BERANI SEHAT”** pembentukannya *penanganan stunting* dan **“BERANI HARMONI”** yang uraiannya adalah pembentukan *Sentra Sarana Olahraga dan Peningkatan WiraUsaha Baru (WUB)* sebanyak 1.000 Pemuda.

Berikut adalah bagan cascading Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, terlihat pada gambar di bawah ini :

3.1 GAMBAR BAGAN CASCADING RPJMD 2025-2029



3.2 GAMBAR BAGAN CASCADING RENSTRA PD 2025-2029



3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga mereview dari sasaran strategis dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 yaitu: “*Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja*” yang ditandai dengan bonus demografi yang mana populasi terbesarnya adalah Pemuda dimana harapan pembangunan ada pada kalangan muda dalam penciptaan lapangan kerja baru. Dan “*Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat*” publik pada umumnya olahraga acapkali dikonotasikan dengan pergulatan menang-kalah untuk memperoleh medali. Namun, esensi olahraga jauh lebih mulia dan strategis daripada sekedar kemenangan dan medali. Jika ditelusuri banyak manfaat yang diperoleh dari keterlibatan individu dalam olahraga. Tiga tujuan utama olahraga, yakni tujuan keunggulan performa (kebugaran), tujuan kesehatan masyarakat, dan tujuan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan Perangkat Daerah adalah *Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan*

Sementara sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan;

Adalah bagian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan sub indikator adalah Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan menunjukkan sejauh mana pemuda terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari menjadi anggota hingga terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yang mengindikasikan tingkat keterlibatan dan pengaruh mereka dalam organisasi tersebut

- 2) Meningkatkan prestasi olahraga; dan
- 3) Meningkatkan pembangunan olahraga.

Angka 2 dan 3 merupakan bagian dari indikator Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) yang mana sub indikator penunjangnya adalah nilai 9 (sembilan) dimensi IPO.

terlihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	60	61,15	62,26	62,89	65,39	67,89	70,38	
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,408	0,433	0,458	0,483	0,508	0,533	0,558	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,53	4,53	6,53	8,53	10,53	12,53	14,53	
		Meningkatnya prestasi olahraga unggulan	Rata-rata capaian raihan medali olahraga unggulan Provinsi	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	

Agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur, maka diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana. Penahapan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang logis dan realistis, disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan pertimbangan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pemuda Dan Olahraga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka Penahapan dan Strategi serta Arah Kebijakan yang dipilih sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

TABEL 3.2 PENAHPAN RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Pemetaan wilayah prioritas dan pelatihan dan penyediaan sarana Wirausaha Muda	Evaluasi, monitoring, penguatan kelembagaan dan pelatihan dan penyediaan sarana Wirausaha Muda	Evaluasi, monitoring, penguatan kelembagaan dan pelatihan dan penyediaan sarana Wirausaha Muda	Evaluasi, monitoring, penguatan kelembagaan dan pelatihan dan penyediaan sarana Wirausaha Muda serta perluasan jejaring wirausaha baru	Pemberdayaan produk wirausaha muda dalam skala regional dan nasional
Penyebar luasan informasi Kepemudaan dalam penjangkauan agenda-agenda penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda	Pembentukan komunitas Pemuda Tangguh sebagai wujud kemandirian pemuda	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kepemudaan	Evaluasi dan penghargaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam kontribusi pembangunan	Peningkatan daya saing pemuda ditingkat nasional dan global
Penyusunan, Konsolidasi dan Penguatan dalam Penyusunan serta pelaporan dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan	Evaluasi dan monitoring serta pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan	Evaluasi dan monitoring serta pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan	Evaluasi dan monitoring serta pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan juga mendorong pencapaian daya saing kepemudaan	Evaluasi, Penyusunan, Konsolidasi dan Penguatan kembali dalam Penyusunan serta pelaporan dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan periode berikut

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Konsolidasi lembaga Kepramukaan serta penguatan kelembagaan KWARDA dan KWARCAB Kab/Kota	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan KWARDA dan KWARCAB Kab/Kota	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan KWARDA dan KWARCAB Kab/Kota	Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan KWARDA dan KWARCAB Kab/Kota	Menyusun bahan evaluasi dan pelaksanaan selama 5 tahun sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan 5 tahun kedepan
Konsolidasi dan penguatan kelembagaan, sarana, prasarana serta SDM olahraga didalam kesiapan even regional dan nasional	Peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan, sertifikasi pelatih, wasit dan juri juga seleksi atlet pada even Nasional	Evaluasi, monitoring dan pengawasan hasil pelaksanaan even dan kegiatan lainnya	Evaluasi, monitoring dan pengawasan hasil pelaksanaan even dan kegiatan lainnya	Menyusun bahan evaluasi dan pelaksanaan selama 5 tahun sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan 5 tahun kedepan
Penyusunan dan penerapan Peta Jalan DOD serta menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring bagi seluruh Kab/Kota	Penyusunan dan penyiapan bahan evaluasi dan monitoring Peta Jalan DOD terhadap kesesuaian Keputusan Kepala Daerah bagi seluruh Kab/Kota	Penyusunan dan penyiapan bahan evaluasi dan monitoring Peta Jalan DOD terhadap kesesuaian Keputusan Kepala Daerah bagi seluruh Kab/Kota terhadap promosi dan degradasi Cabor	Penyusunan dan penyiapan bahan evaluasi dan monitoring Peta Jalan DOD menuju tahapan Peta Jalan DOD periode 2030-2035 bagi Pemerintah Provinsi serta Kab/Kota	Implementasi Peta Jalan DOD periode 2030-2035 bagi Pemerintah Provinsi serta Kab/Kota
Konsolidasi dan penguatan kelembagaan terhadap pelaksanaan dan evaluasi IPO Mandiri secara menyeluruh bagi Kab/Kota	Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi IPO Mandiri secara menyeluruh bagi Kab/Kota	Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi IPO Mandiri secara menyeluruh bagi Kab/Kota	Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi IPO Mandiri secara menyeluruh bagi Kab/Kota	Penguatan dan keberlanjutan pelaksanaan dan evaluasi IPO Mandiri secara menyeluruh bagi Kab/Kota

Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dalam mencapai sasaran pembangunan. Arah kebijakan pembangunan yang dibuat juga telah diselaraskan dengan isu strategis pembangunan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang mencakup pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.yang terlihat pada tabel berikut :

TABEL 3.3 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Proses penyusunan NSPK melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. NSPK kemudian ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.	Penguatan kolaborasi lintas sector (kesehatan, pendidikan, sosial, ketahanan pangan, pertanian, dan perumahan) untuk mengintegrasikan intervensi pencegahan stunting di tingkat desa/kelurahan	Promosi gaya hidup sehat melalui olahraga , Aktivitas fisik dan olahraga merupakan bagian integral dari gaya hidup sehat yang mendukung kesehatan optimal, termasuk dalam konteks pencegahan stunting Program Olahraga Komunitas : Menginisiasi dan mendukung kegiatan olahraga rutin di tingkat desa/kelurahan (seperti senam bersama) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk ibu hamil dan keluarga balita, berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan PKK	
	Pelaksanaan NSPK dilakukan oleh seluruh unit kerja pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. NSPK harus menjadi dasar dalam pelaksanaan setiap kegiatan.	Penguatan integrasi pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga ke tingkat desa	Peningkatan Peran Pemuda, Optimalisasi Kegiatan Olahraga dan Kesehatan, Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	
1	Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan NSPK dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan	Revitalisasi fasilitas olahraga di daerah perkotaan dan pedesaan	peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, pemerataan akses, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas untuk masyarakat luas. Pendekatan untuk perkotaan dan pedesaan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Pengembangan pusat pelatihan olahraga berbasis teknologi	pengembangan pusat pelatihan olahraga berbasis teknologi umumnya mencakup integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ke dalam sistem pembinaan atlet, standarisasi pelatihan, dan pengelolaan data berbasis digital Pemanfaatan Teknologi dalam Pelatihan, Pengembangan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Kualitas SDM Pelatih dan Pengelola, Pengelolaan Data dan Informasi , Standarisasi Pembinaan Kolaborasi Lintas Sektor, serta Pemerataan Akses Teknologi	
		Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah melalui kewirausahaan, inovasi, kepemimpinan, dan penguatan organisasi kepemudaan yang produktif dan inklusif.	Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah mencakup beberapa fokus utama, yaitu : Kewirausahaan Pemuda : Pengembangan Inovasi Kewirausahaan, Program Wirausaha Muda, Penyediaan Akses Permodalan, dan Peningkatan Kompetensi Usaha Inovasi : Pengembangan Inovasi Manajemen, Fasilitasi Pemuda Pelopor, dan Penyediaan Akses Informasi Kepemimpinan : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Forum Kepemimpinan Pemuda, serta Pengembangan Karakter dan Kemandirian Penguatan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang Produktif dan Inklusif : Pembinaan dan Fasilitasi OKP,	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			Peningkatan Peran OKP, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas, serta Inklusivitas	
		Pengembangan program pelatihan berbasis keterampilan teknis dan wirausaha	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Teknis, Pengembangan Kewirausahaan Muda, Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Pemuda, Kolaborasi dan Kemitraan, Fasilitasi dan Pendampingan Usaha, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pemuda Dan Olahraga sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Tahun 2025-2029. Berikut disajikan tabel 4.2 tentang rencana program, kegiatan beserta pagu indikatif pada periode tahun Renstra (2025-2029), yang selanjutnya harus dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Pada tabel di bawah memberikan arah dalam penentuan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara konsisten dan berkesinambungan didalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan bahwa implementasi selama 5 (lima) tahun kedepan dapat terus berkelanjutan, yang bisa dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.1 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kepeemudaan dan Keolahragaan				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat			Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan				Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan				Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat, Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga				Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Di Daerah					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda Di Daerah					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga					Blj. Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Makan dan Minum Rapat, Jasa Tenaga Ahli, Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dan Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Di Daerah					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Makan dan Minum Rapat, Jasa Tenaga Ahli, Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dan Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan				Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat, Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, Perjadin Biasa dan Perjadin dalam Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat, Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, Perjadin Biasa dan Perjadin dalam Kota	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
				Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Blj. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya PDH	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat, Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Blj. Perjadin Biasa dan Kontribusi	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah			
				Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Komputer, Alat Listrik, Kegiatan Kantor Lainnya serta Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Blj. Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 4	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Blj. Meja, Kursi, Komputer, Laptop, Printer, Genset, TV, AC	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Blj. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 4, Meja, Kursi, Komputer, Laptop, Printer, Genset, TV, AC	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Tagihan Listrik, Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Blj. Pemeliharaan Alat Pendingin, Komputer, Printer	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Blj. Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan Pendapatan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat, Tenaga Pelayanan Umum, Penanggungjawab Pengelola Keuangan, dan Pengadaan Barang/Jasa	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
					Blj. BBM, Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Operasional Roda 2, 4 dan 6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Blj. Pemeliharaan Alat Pendingin, Komputer, Printer, dan Laptop	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Blj. Pemeliharaan Saprass Gedung Kantor	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya daya saing kepemudaan		Rasio Wirausaha Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan		Persentase sarana pemuda yang termanfaatkan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase prasarana pemuda yang termanfaatkan		
			Meningkatnya peran organisasi pemuda		Persentase organisasi pemuda yang aktif		
				Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kewirausahaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
				Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kepemimpinan	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi		
				Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kepeloporan	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase sarana dan prasarana Pemuda dalam kondisi baik	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Komputer, Barang utk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Perjadin Biasa, Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, serta Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat, Jasa Tenaga Ahli, Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, serta Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas, Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- Lainnya, Makan dan Minum Rapat, Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, Sewa Alat Kantor Lainnya, Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, serta Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas, Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Makan dan Minum Rapat, Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, Sewa Alat Kantor Lainnya, Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Jasa Tenaga Ahli, dan Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Barang utk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Makan dan Minum Rapat, Makmin Jamuan Tamu, Jasa Tenaga Ahli, Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, serta Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	
				Persentase Pemuda yang dibina dibidang keorganisasian	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Lainnya, Makan dan Minum Rapat, Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, serta Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	
		Meningkatnya Prestasi olahraga	Meningkatnya kebudayaan dan prestasi olahraga		Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
					Persentase medali yang diperoleh dalam event olahraga		
					Persentase induk olahraga yang berprestasi		
			Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan		Persentase sarana olahraga yang termanfaatkan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase prasarana olahraga yang termanfaatkan		
				Persentase sarana dan prasarana Olahraga dalam kondisi baik	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat, Perjadin Biasa, Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, serta Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase olahraga unggulan yang beprestasi	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</i>	
					Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		
					Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara		
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga, Makan dan Minum Rapat, Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Juri Perlombaan/Pertandingan, serta Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga, Makan dan Minum Rapat, Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Juri Perlombaan/Pertandingan, serta Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. BBM, Bahan-bahan Lainnya, Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Bahna Cetak, Benda Pos, Bahan Komputer, Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga, Makan dan Minum Rapat, Makan dan Minum Jamuan Tamu, Makan dan Minum Aktivitas Lapangan, Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Jasa Tenaga Ahli, Juri Perlombaan/Pertandingan, Jasa Iklan Reklame, Sewa Elektrik Genarating Set, Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Sewa Alat Ksntor Lainnya, Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya, Perjadin Biasa, Perjadin Dalam Kota, dan Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pengembangan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		
					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		
					Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat, serta Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga, Makan dan Minum Rapat, Tenaga Ahli, dan Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat, Makan dan Minum Aktivitas Lapangan, Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Jasa Tenaga Ahli, Perjadin Biasa, dan Perjadin Dalam Kota	Sub Kegiatan Penyediaan data Keolahragaan terpadu di Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga, Makan dan Minum Rapat, Makan dan Minum Aktivitas Lapangan, Jasa Tenaga Ahli, dan Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	
				Persentase Tenaga Keolahragaan yang bersertifikat Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	
				Persentase Wasit Olahraga Bersertifikat Nasional	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan organisasi Keolahragaan di provinsi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Makan dan Minum Rapat, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Perjadin Biasa, Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Perjadin Biasa	Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya kualitas kepramukaan		Tingkat partisipasi pelajar dalam kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya minat pemuda dalam mengikuti Organisasi Kepemudaan	Persentase Pemuda yang dibina dalam Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Blj. Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor- ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Makan dan Minum Rapat, Honorarium Narsum atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Jasa Tenaga Ahli, Perjadin Biasa, dan Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			80.355.415.855		32.183.220.000		34.575.888.170,89		7.105.738.114,25		39.936.595.538,30		43.112.438.904,09	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13.786.895.445		13.111.670.000		13.422.400.171		14.446.530.114		15.801.760.038		17.345.170.004	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50,00		60,00	13.111.670.000	65,00	13.422.400.171	70,00	14.446.530.114	75,00	15.801.760.038	80,00	17.345.170.004	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			566.703.800		226.059.800		240.000.000		257.000.000		280.800.000		310.000.000	
Nilai Sakip Perangkat Daerah	Persentase / Predikat Nilai AKIP	70,00		75,00		78,00		81,00		84,00		87,00		
Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	Presentase IKU Perangkat Daerah	85,00		89,00		91,00		93,00		94,00		96,00		
Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	Nilai Capaian Data Statistik Sektoral	5		5		5		5		5		5		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah / Dokumen	6 Dok	566.703.800	6 Dok	130.000.000	6 Dok	135.000.000	6 Dok	135.000.000	6 Dok	143.000.000	7 Dok	145.000.000	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	32.000.000	4 Laporan	35.000.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah / Dokumen		-	1 Dok	38.029.900	1 Dok	40.000.000	1 Dok	46.000.000	1 Dok	52.900.000	1 Dok	65.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah / Dokumen		-	1 Dok	38.029.900	1 Dok	40.000.000	1 Dok	46.000.000	1 Dok	52.900.000	1 Dok	65.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.886.122.580		10.225.610.200		10.493.750.171		10.758.218.114		10.973.122.788		11.246.000.004	
Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	Persentase	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	Persentase	97,00		96,60		97,30		97,85		99,50		99,89		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN / Orang/Bulan	88 Orang	8.761.897.680	94 Orang	10.125.610.199,63	107 Orang	10.378.750.170,89	110 Orang	10.638.218.114,25	115 Orang	10.835.122.738,30	120 Orang	11.106.000.004,44	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD / Dokumen	2 Dok	-	2 Dok	35.000.000	2 Dok	37.000.000	2 Dok	38.000.000	2 Dok	43.700.050	2 Dok	44.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD / Laporan	2 Lap	124.224.900	2 Lap	50.000.000	2 Lap	60.000.000	2 Lap	62.000.000	2 Lap	70.000.000	2 Lap	71.000.000	
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok		1 Dok	15.000.000	1 Dok	18.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	24.300.000	1 Dok	25.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah			309.968.200		100.000.000		115.000.000		120.000.000		151.000.000		150.000.000	
<i>Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan</i>	<i>Persentase</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok		2 Dok	10.000.000	2 Dok	12.000.000	2 Dok	13.000.000	2 Dok	15.000.000	2 Dok	15.000.000	
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	309.968.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	-	12 Lap	14.000.000	12 Lap	91.000.000	12 Lap	92.400.000	12 Lap	120.000.000	12 Lap	120.000.000	
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap		2 Lap	10.000.000	2 Lap	12.000.000	2 Lap	14.600.000	2 Lap	16.000.000	2 Lap	15.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1 Lap	66.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			121.942.450		80.000.000		146.000.000		164.500.000		180.250.000		193.000.000	
<i>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase</i>			<i>96,00</i>		<i>97,00</i>		<i>98,00</i>		<i>99,00</i>		<i>100,00</i>		
<i>Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase</i>			<i>96,00</i>		<i>97,00</i>		<i>98,00</i>		<i>99,00</i>		<i>100,00</i>		
<i>Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK</i>	<i>Persentase</i>			<i>86</i>		<i>87</i>		<i>88</i>		<i>89</i>		<i>90</i>		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	165 Dok	10.000.000	165 Dok	15.000.000	170 Dok	17.500.000	170 Dok	20.000.000	170 Dok	21.000.000	
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	1 Dok	15.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	40.250.000	1 Dok	41.000.000	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	121.942.450	70 Orang	55.000.000	90 Orang	101.000.000	100 Orang	112.000.000	100 Orang	120.000.000	100 Orang	131.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			97.633.215		210.000.000		269.000.000		295.000.000		320.500.000		350.000.000	
Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektor pada Perangkat Daerah	Nilai			96		97		98		99		100		
Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	Nilai			96		97		98		99		100		
Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	Nilai			96		97		98		99		100		
Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	Persentase			96,00		97,00		98,00		99,00		100,00		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan / Paket	3 Paket	97.633.215	3 Paket	50.000.000	3 Paket	60.000.000	3 Paket	70.000.000	3 Paket	80.500.000	3 Paket	90.000.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD / Laporan		-	5 Laporan	120.000.000	5 Laporan	165.000.000	5 Laporan	175.000.000	5 Laporan	180.000.000	5 Laporan	190.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			200 Dok	20.000.000	200 Dok	22.000.000	200 Dok	25.000.000	200 Dok	30.000.000	200 Dok	35.000.000	
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			200 Dok	20.000.000	200 Dok	22.000.000	200 Dok	25.000.000	200 Dok	30.000.000	200 Dok	35.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			231.371.500		70.000.000		100.000.000		564.000.000		600.000.000		1.300.000.000	
Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	Nilai			86		87		88		89		90		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan / Unit	8 Unit	231.371.500	8 Unit	70.000.000	5 Unit	100.000.000	1 Unit	564.000.000	20 Unit	600.000.000	22 Unit	1.300.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.898.323.700		1.830.000.000		1.634.500.000		1.809.675.000		2.081.126.250		2.727.006.000	
Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	5		5		5		5		5		5		
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Persentase	82		84		86		90		92		94		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan / Laporan	12 Laporan	734.037.200	12 Laporan	830.000.000	12 Laporan	834.500.000	12 Laporan	959.675.000	12 Laporan	1.103.626.250	12 Laporan	1.749.006.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan / Laporan	12 Laporan	2.164.286.500	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	850.000.000	12 Laporan	977.500.000	12 Laporan	978.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			674.830.000		370.000.000		424.150.000		478.137.000		1.214.961.000		1.069.164.000	
<i>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</i>	<i>Persentase</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya / Unit	39 Unit	674.830.000	39 Unit	280.000.000	39 Unit	295.800.000	39 Unit	340.170.000	39 Unit	450.000.000	39 Unit	517.500.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara / Unit		-	132 Unit	40.000.000	132 Unit	50.000.000	132 Unit	57.500.000	132 Unit	328.211.000	132 Unit	377.442.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi / Unit		-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	78.350.000	1 Unit	80.467.000	2 Unit	436.750.000	1 Unit	174.222.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1.964.018.416		2.394.430.000		3.451.170.000		3.638.190.000		3.885.690.000		3.705.438.900	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	0,50	148.275.000	0,43	1.850.000.000	0,50	2.845.075.500	0,57	2.948.381.000	0,64	3.113.239.400	0,71	2.973.303.210	
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan	Persentase sarana pemuda yang dimanfaatkan	21,25	822.877.260	25,00	300.000.000	43,75	345.000.000	62,50	396.750.000	81,25	476.363.000	93,75	391.634.950	
	Persentase prasarana pemuda yang dimanfaatkan	20,00		20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		
Meningkatnya peran organisasi pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	58,33	992.866.156	41,67	244.430.000	50,00	261.094.500	58,33	293.059.000	66,67	296.087.600	79,17	340.500.740	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kegiatan Pengadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			1.894.018.416		2.150.000.000		3.190.075.500		3.345.131.000		3.589.602.400		3.364.938.160	
<i>Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kewirausahaan</i>	<i>Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangannya</i>	<i>0,01</i>		<i>0,10</i>		<i>0,10</i>		<i>0,10</i>		<i>0,10</i>		<i>0,10</i>		
<i>Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kepemimpinan</i>	<i>Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda</i>	<i>0,01</i>		<i>0,01</i>		<i>0,01</i>		<i>0,01</i>		<i>0,02</i>		<i>0,02</i>		
<i>Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kepeloporan</i>	<i>Presentase Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/ Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>	<i>13,33</i>		<i>13,33</i>		<i>20,00</i>		<i>26,67</i>		<i>33,33</i>		<i>33,33</i>		
<i>Persentase sarana dan prasarana Pemuda dalam kondisi baik</i>	<i>Presentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		
Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan / Unit	1 Unit	822.877.260	1 Unit	300.000.000	1 Unit	345.000.000	1 Unit	396.750.000	1 Unit	476.363.000	1 Unit	391.634.950	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi / Dokumen	1 Dok	118.191.650	1 Dok	200.000.000	1 Dok	210.000.000	1 Dok	211.500.000	1 Dok	213.225.000	1 Dok	382.323.250	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	47,78	720.000.256	47,78	250.000.000	48,89	195.075.500	50,00	110.881.000	51,11	127.513.150	52,22	146.640.123	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda / Orang	3 Org	84.674.250	3 Org	250.000.000	3 Org	267.500.000	3 Org	277.625.000	3 Org	221.870.881	3 Org	255.151.513	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda / Orang	20 Org	148.275.000	200 Org	1.150.000.000	200 Org	2.172.500.000	200 Org	2.348.375.000	200 Org	2.550.630.369	200 Org	2.189.188.324	
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			70.000.000		244.430.000		261.094.500		293.059.000		296.087.600		340.500.740	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Persentase Pemuda yang dibina dibidang keorganisasian</i>	<i>Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda</i>	6,00		7,80		7,80		10,36		10,36		13,24		
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda / Persentase		-	100,00	244.430.000	100,00	261.094.500	100,00	293.059.000	100,00	296.087.600	100,00	340.500.740	
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi / Organisasi	50 Org	70.000.000		-		-		-		-		-	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			63.584.501.994		16.268.600.000		17.284.118.000		18.570.908.000		19.756.805.500		21.521.410.000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase medali yang diperoleh dalam event olahraga	50,00	59.129.012.708	64,00	12.800.000.000	50,00	12.690.230.000	68,75	13.582.955.000	50,00	12.728.131.250	70,00	14.637.350.938	
	Persentase induk olahraga yang berprestasi	10,53	940.059.808	10,53	2.300.000.000	42,11	2.620.000.000	13,16	2.845.125.000	18,42	4.656.976.250	7,89	4.329.607.188	
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan	Persentase sarana olahraga yang dimanfaatkan	40,00	3.515.429.478	60,00	1.168.600.000	65,71	1.973.888.000	70,00	2.142.828.000	93,33	2.371.698.000	83,33	2.554.451.875	
	Persentase prasarana olahraga yang dimanfaatkan	71,43		85,71		85,71		85,71		92,86		100,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		80,00	1.405.751.462	83,33	300.000.000	83,33	345.000.000	100,00	396.750.000	100,00	456.262.500	100,00	524.701.875	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana Olahraga dalam kondisi baik	71,43		85,71		85,71		85,71		92,86		100,00		
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia / Unit	1 Unit	1.405.751.462	1 Unit	300.000.000	1 Unit	345.000.000	1 Unit	396.750.000	1 Unit	456.262.500	1 Unit	524.701.875	
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		75,00	5.621.691.024	75,00	3.518.600.000	75,00	4.451.388.000	100,00	3.944.453.000	100,00	4.443.566.750	100,00	4.937.100.938	
Meningkatnya prestasi olahraga unggulan	Persentase olahraga unggulan yang beprestasi	75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Persentase keikutsertaan kontingen dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Persentase pelaksanaan paralimpik pelajar Tingkat Provinsi			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga / Orang	3 Kegiatan	3.512.013.008	3 Kegiatan	2.500.000.000	3 Kegiatan	2.650.000.000	3 Kegiatan	2.000.000.000	3 Kegiatan	2.300.000.000	3 Kegiatan	2.645.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi / Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	172.500.000	1 Kegiatan	198.375.000	1 Kegiatan	228.131.250	1 Kegiatan	262.350.938	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara / Kegiatan	4 Kegiatan	2.109.678.016	4 Kegiatan	868.600.000	4 Kegiatan	1.628.888.000	4 Kegiatan	1.746.078.000	4 Kegiatan	1.915.435.500	4 Kegiatan	2.029.750.000	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		100,00	809.859.158	100,00	2.150.000.000	100,00	2.447.500.000	100,00	2.646.750.000	100,00	4.428.845.000	100,00	4.067.256.250	
Meningkatnya Kualitas pelaksanaan pengembangan olahraga	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pengembangan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota	75,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Persentase pelaksanaan Seleksi Atlet SPOBDA - DOD	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Persentase Atlet yang dibina paada Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah (SPOBDA) - DOD	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Persentase capaian IPO	0,408		0,458		0,483		0,508		0,533		0,558		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Persentase atlet berprestasi yang dibina	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi / Orang		-	40 Atlet	300.000.000	1.000 Atlet	345.000.000	260 Atlet	396.750.000	104 Atlet	456.262.500	104 Atlet	297.256.250	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		3 Kegiatan	1.000.000.000	4 Kegiatan	1.150.000.000	4 Kegiatan	1.200.000.000	4 Kegiatan	2.765.082.500	3 Kegiatan	2.500.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	809.859.158	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	402.500.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	517.500.000	1 Dokumen	520.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-		30 Atlet	500.000.000	30 Atlet	550.000.000	60 Atlet	600.000.000	120 Atlet	690.000.000	150 Atlet	750.000.000	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		4,08	55.747.200.350	4,08	10.300.000.000	4,67	10.040.230.000	4,46	11.582.955.000	4,27	10.428.131.250	4,10	11.992.350.938	
Meningkatnya kualitas Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional	Persentase Tenaga Keolahragaan yang bersertifikat Nasional	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Meningkatnya Kualitas Wasit Olahraga Unggulan Bersertifikat Nasional	Persentase Wasit Olahraga Bersertifikat Nasional	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	55.616.999.700	1 Dokumen	10.150.000.000	1 Dokumen	9.867.730.000	1 Dokumen	11.384.580.000	1 Dokumen	10.200.000.000	1 Dokumen	11.730.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi / Dokumen	1 Dokumen	130.200.650	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	172.500.000	1 Dokumen	198.375.000	1 Dokumen	228.131.250	1 Dokumen	262.350.938	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		BASELINE 2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			1.020.000.000		408.520.000		418.200.000		450.110.000		492.340.000		540.420.000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat partisipasi pelajar dalam kepramukaan	10,00		10,51		12,35		14,35		16,35		18,35		
<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>		60,00	1.020.000.000	67,00	408.520.000	77,55	418.200.000	87,55	450.110.000	97,55	492.340.000	100,00	540.420.000	
<i>Meningkatnya minat pemuda dalam mengikuti Organisasi Kepemudaan</i>	<i>Persentase Pemuda yang dibina dalam Organisasi Kepramukaan</i>	60,00		67,00		77,55		87,55		97,55		100,00		
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya / Organisasi		-	29 Organisasi	408.520.000	29 Organisasi	418.200.000	29 Organisasi	450.110.000	29 Organisasi	492.340.000	29 Organisasi	540.420.000	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas / Unit	1 Unit	1.020.000.000		-		-		-		-		-	

Pada tabel di bawah ini memberikan gambaran implementasi yang berkaitan dengan 9 (sembilan) program prioritas “BERANI” yang mana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Dinas Pemuda Dan Olahraga termasuk dalam mendukung “Berani HARMONI” dengan menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan Wirausaha Baru (WUB) dalam pengentasan atupun pengurangan pengangguran dikalangan Pemuda dengan batasan usia 16-30 Tahun.

Intervensi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diperiode RENSTRA PD 2025-2029 dititikberatkan sebagai berikut :

TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
		Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Bidang Kepemudaan
		Meningkatnya peran organisasi pemuda	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	Bidang Ketenagaan, Kepramukaan dan Organisasi Pemuda
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
		Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Bidang Keolahragaan dan Kepala Bidang Saprass Dan Standarisasi
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Bidang Keolahragaan dan Kepala Bidang Saprass Dan Standarisasi
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Bidang Ketenagaan, Kepramukaan dan Organisasi Pemuda

Dalam melaksanakan kinerja telah ditetapkan Rumusan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda Dan Olahraga juga telah ditetapkan indikator kinerjanya sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut. Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam melaksanakan fungsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemuda Dan Olahraga dengan target kinerja yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Persen	61,15	62,26	62,89	65,39	67,89	70,38	
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		Meningkatnya Prestasi Olahraga Unggulan	Persen	0,433	0,458	0,483	0,508	0,533	0,558	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Persen	4,53	6,53	8,53	10,53	12,53	14,53	
2	Dimensi Ruang Terbuka		Meningkatnya Prestasi Olahraga Unggulan	Persen	0,817	0,842	0,867	0,892	0,917	0,942	
3	Dimensi Ekonomi			Persen	0,801	0,826	0,851	0,876	0,901	0,926	
4	Dimensi SDM			Persen	0,063	0,088	0,113	0,138	0,163	0,188	
5	Dimensi Partisipasi			Persen	0,301	0,326	0,351	0,376	0,401	0,426	
6	Dimensi Performa			Persen	0,073	0,098	0,123	0,148	0,173	0,198	
7	Dimensi Kebugaran Jasmani			Persen	0,204	0,229	0,254	0,279	0,304	0,329	
8	Dimensi Kesehatan			Persen	0,446	0,471	0,496	0,521	0,546	0,571	
9	Dimensi Perkembangan Personal			Persen	0,560	0,585	0,610	0,635	0,660	0,685	
10	Dimensi Literasi Fisik			Persen	0,633	0,658	0,683	0,708	0,733	0,758	

Perhitungan (formulasi) dan definisi operasional dari Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), pada tabel berikut :

TABEL 4.6 FORMULASI DAN DEFINISI OPERASIONAL IKU DAN IKK

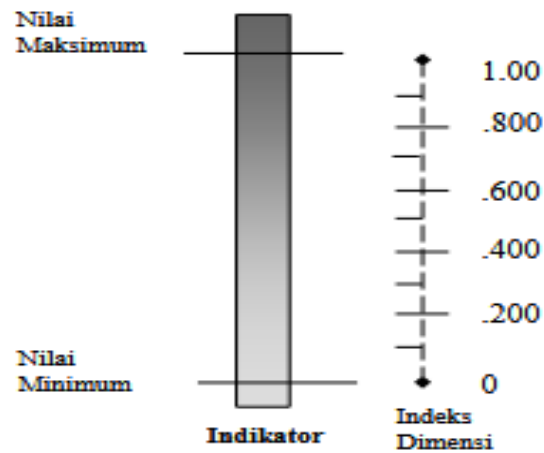
NO	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Instrumen untuk mengukur dan menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, yang dirancang untuk mengevaluasi kondisi pemuda berdasarkan lima domain utama	<p>Lalu, formulasi pada tingkat indeks adalah sebagai berikut:</p> $IPP_i = \sum_{k=1}^m wt_k r_i \dots (10)$ <p>dengan:</p> <p>IPP_i : Nilai indeks IPP</p> <p>wt_k : Bobot pada masing-masing domain</p>	Pendidikan dan Pelatihan = Pemuda memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan agar dapat meningkatkan kompetensi individu pemuda.
2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan				Kesehatan = Pemuda memiliki kualitas kesehatan fisik dan mental yang baik, serta tidak melakukan perilaku berisiko.
3	Meningkatnya peran organisasi pemuda				Penghidupan dan Ketenagakerjaan = Pemuda yang produktif dan memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak.
4	Meningkatnya kualitas kepramukaan				Partisipasi dan Kepemimpinan = Pemuda yang ikut serta secara aktif di bidang sosial kemasyarakatan dan memiliki jiwa kepemimpinan.
5	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga				Inklusivitas dan Kesetaraan Gender = Partisipasi pemuda perempuan, pemuda disabilitas, dan pemuda miskin dalam pembangunan secara setara dan tidak mengalami eksklusi.
6	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks gabungan yang mengukur keberhasilan pembangunan keolahragaan di suatu wilayah	$\text{Indeks IPO} = \frac{(D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)}{9}$	untuk menghasilkan IPO dengan cara menghitung rata-rata indeks gabungan dari setiap dimensi Keterangan: D1= Dimensi IPO pertama, D2= Dimensi IPO kedua, dst.... Adapun norma yang dipakai

NO	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL
1		2	3	4	5
					untuk mengkategorisasikan indeks IPO adalah sebagai berikut. 0,800 – 1 = Kategori tinggi 0,500 – 0,799 = Kategori menengah 0 – 0,499 = Kategori rendah
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, politik, maupun kewargaan, serta jiwa kepemimpinan pemuda.	$r_j = \sum_{k=1}^m w_{ijk} X_{jnk} \dots (9)$ <p>dengan: r_{ijn} : Nilai indeks pada domain -i w_{ij} : Bobot pada masing-masing indikator X_{ij} : Indikator nomor-j pada domain -i</p>	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan = Proporsi pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir terhadap populasi pemuda seluruhnya Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi = Proporsi pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah terhadap populasi pemuda seluruhnya Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial = Proporsi pemuda yang bekerja menduduki posisi manajerial terhadap populasi pemuda bekerja
		Dimensi Ruang Terbuka	Suatu tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga, baik indoor maupun outdoor. Ruang terbuka merupakan tempat yang menjadi kebutuhan dasar bagi siapa pun untuk melakukan aktivitas olahraga	$\text{Indeks Dimensi} = \frac{\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum}}{\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}$	Untuk menentukan skala tersebut di atas memerlukan beberapa besaran (yaitu: nilai aktual, nilai maksimum, dan nilai minimum) untuk kemudian dikonversi ke dalam indeks dimensi. Besarnya koefisien yang mencerminkan indeks dimensi berkisar antara 0 dan 1
		Dimensi Ekonomi	Pengeluaran individu terkait aktivitas olahraga, baik dalam	Idem	

NO	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL
1		2	3	4	5
			bentuk barang maupun jasa, dalam satu tahun. Belanja barang dapat berupa peralatan dan perlengkapan olahraga		<p>Nilai aktual adalah skor nyata yang diperoleh berdasarkan patokan yang telah ditetapkan. Misalnya, patokan angka partisipasi menggunakan nilai minimum nol dan maksimum 100, patokan angka ruang terbuka menggunakan nilai minimum nol dan nilai maksimum 3,5, dan patokan angka kebugaran menggunakan nilai minimum 20,1 dan nilai maksimum 52,1. Setelah semua indeks dimensi ditemukan</p>
		Dimensi SDM	Merujuk pada pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga yang merupakan komponen utama dalam sistem pembinaan dan pengembangan olahraga	Idem	
		Dimensi Partisipasi	Keterlibatan individu dalam olahraga/ aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir	Idem	
		Dimensi Performa	Capaian olahragawan atau sekelompok olahragawan termasuk penyandang disabilitas sebagai hasil dari pembinaan olahraga prestasi prioritas DBON pada suatu wilayah	Idem	
		Dimensi Kebugaran Jasmani	Kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti	Idem	
		Dimensi Kesehatan	Mencakup sehat secara fisik dan psikis yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif	Idem	
		Dimensi Perkembangan Personal	Aspek-aspek kepribadian yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang konstruktif, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat.	Idem	
		Dimensi Literasi Fisik	Rangkaian pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggungjawab seseorang dalam melakukan aktivitas fisik untuk hidup yang berkualitas sepanjang hayat	Idem	

Penentuan indeks untuk masing-masing dimensi dilakukan dengan menggunakan skala, sebagaimana tampak pada gambar berikut :

4.1 GAMBAR SKALA PENENTUAN IPO



Model Skala Penentuan Indeks

Untuk menentukan skala tersebut di atas memerlukan beberapa besaran (yaitu: nilai aktual, nilai maksimum, dan nilai minimum) untuk kemudian dikonversi ke dalam indeks dimensi.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 telah disusun secara substansi mengacu pada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Dengan demikian komponen yang ada didalamnya telah memuat apa yang menjadi harapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Saran, Kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tentunya akan sukses mengimplementasikan Rencana Strategisnya apabila didukung sepenuhnya oleh segenap Aparatur Dinas Pemuda Dan Olahraga, serta kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder).

Palu, 23 September 2025

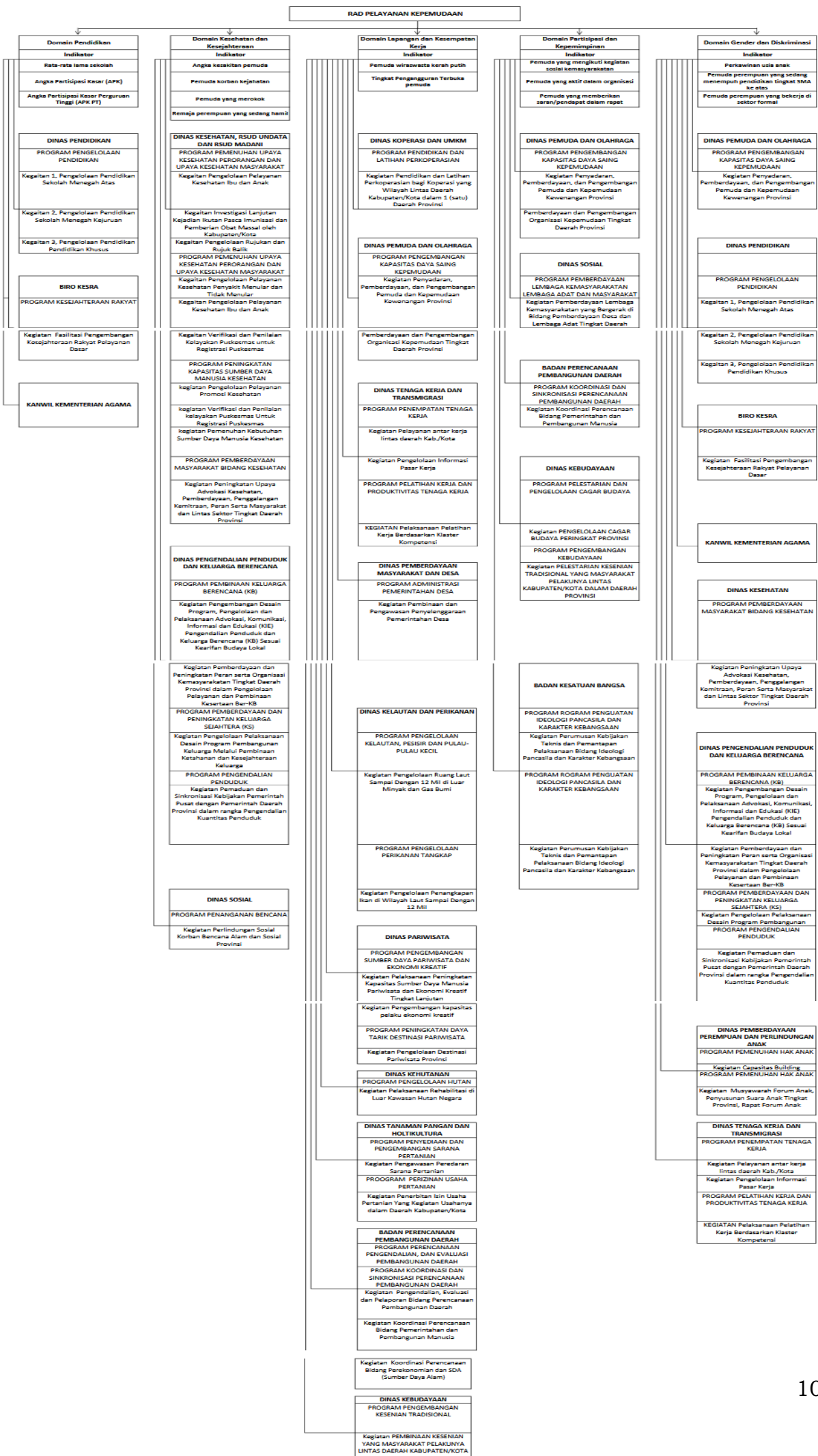
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730321 199311 1 001

GAMBAR BAGAN CROSSCUTTING RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

PEGUB NO. 19 TAHUN 2023

CROSSCUTTING
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN LINTAS SEKTOR



GAMBAR BAGAN CROSSCUTTING DESAIN OLAHRAGA DAERAH

PEGUB NO. 17 TAHUN 2025

